

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGUKUR TINGKAT LITERASI KEUANGAN DI PROVINSI LAMPUNG

Riyentin Zahra

Email; zriyentin@gmail.com

Pendidikan Ekonomi, Universitas Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju baik dari segi teknologi, sosial dan budaya menuntut setiap mahasiswa untuk meningkatkan skill agar siap berkompetisi dalam dunia kerja. Hal tersebut lah yang mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk meluncurkan Kebijakan Nasional Kampus Merdeka yang salah satunya adalah melakukan magang/praktik kerja. Bank Indonesia menyambut baik kebijakan Kemendikbud Ristek dengan meluncurkan Program Kampus Merdeka Bank Indonesia yang merupakan implementasi dari program merdeka belajar. Program Kampus Merdeka Bank Indonesia terbagi menjadi tiga fokus kegiatan utama yaitu kegiatan learning dimana setiap peserta diberikan akses untuk belajar di BI Digital Learning terkait materi yang dapat menunjang pengerjaan projek/riset dan skill peserta, mengerjakan projek/riset dan working experience untuk meningkatkan daya saing dengan pengalaman bekerja di Bank Sentral. Selama melaksanakan magang, penulis ditempatkan di Fungsi Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (FIKSP-PUR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Kegiatan learning, projek dan working experience penulis berada pada bidang Sistem Pembayaran. Hasil dari kegiatan projek yang dilakukan penulis adalah Pengaruh Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Upaya untuk Mengukur Tingkat Literasi Keuangan di Provinsi Lampung. Dengan mengikuti program magang Kampus Merdeka Bank Indonesia, penulis memperoleh ilmu dan pengalaman kerja dalam bidang kebanksentralan dan sistem pembayaran di Bank Indonesia.

Kata Kunci: *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Kampus Merdeka Bank Indonesia, Literasi Keuangan, Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

As times progress, both in terms of technology, social and culture, it requires every student to improve their skills so they are ready to compete in the world of

work. This is what prompted the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemendikbud Ristek) to launch the National Independent Campus Policy, one of which is conducting internships/work practices. Bank Indonesia welcomed the policy of the Ministry of Education and Culture, Research and Technology by launching the Bank Indonesia Independent Campus Program, which is an implementation of the independent learning program. The Bank Indonesia Merdeka Campus Program is divided into three main focus activities, namely learning activities where each participant is given access to study at BI Digital Learning related to material that can support project/research work and participant skills, working on projects/research and working experience to increase competitiveness by experience working at the Central Bank. During the internship, the author was placed in the Rupiah Payment and Money Management System Implementation Function (FIKSP-PUR) at the Bank Indonesia Representative Office, Lampung Province. The author's learning activities, projects and working experience are in the field of Payment Systems. The results of the project activities carried out by the author are the Effect of Implementing the Regional Government Transaction Electronification Policy (ETPD) on Original Regional Income (PAD) as an Effort to Measure the Level of Financial Literacy in Lampung Province. By participating in the Bank Indonesia Merdeka Campus internship program, the author gained knowledge and work experience in the field of central banking and payment systems at Bank Indonesia.

Keywords: *Electronification of Regional Government Transactions, Bank Indonesia Merdeka Campus, Financial Literacy, Regional Original Income*

PENDAHULUAN

Saat ini, hampir seluruh layanan publik, transaksi perdagangan dan keuangan didorong untuk dilakukan dengan prosedur tanpa tatap muka (*face to face*). Hal ini tercermin pada sejumlah data yang menyatakan bahwa kegiatan pembayaran non tunai semakin meningkat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pencapaian target inklusi keuangan yang mencapai angka 76,19% pada tahun 2019, hal tersebut tercatat telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 75%.

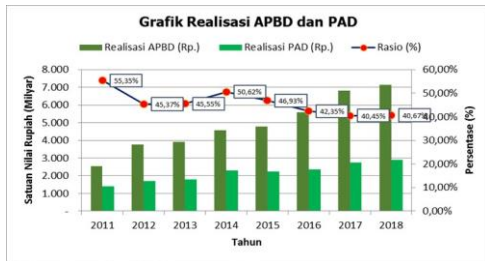
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjelaskan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan

yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.

Pemerintah Provinsi Lampung telah memulai upaya optimalisasi pendapatan daerah, terutama dalam sektor pajak, sejak tahun 2015. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung sebagai pemimpin sektor ini telah membangun dan mengatur sistem manajemen pendapatan daerah berbasis elektronik. Sistem elektronik ini terus ditingkatkan dan diperbarui, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun fasilitas pendukungnya. Sistem yang dikelola oleh Bapenda ini kemudian diintegrasikan dengan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD), yang

mencakup e-planning, e-budgeting, dan e-SSH (Standar Satuan Harga) di Pemerintah Provinsi Lampung.

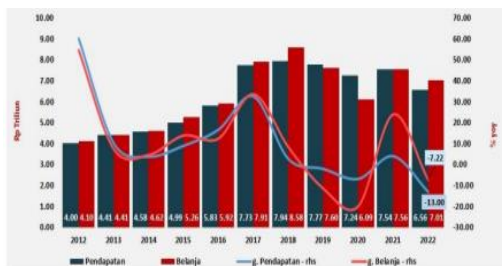
Grafik realisasi APBD dan PAD dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini:



Gambar 2. Grafik Realisasi APBD dan PAD

Sumber: Bapenda Provinsi Lampung, 2019

Berdasarkan dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi APBD dan PAD terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, dengan didorongnya pendapatan dari berbagai sektor sehingga meningkat pula belanja daerah yang direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Salah satu sektor yang meningkatkan PAD dalam grafik diatas didukung oleh sektor digitalisasi ekonomi, pengintegrasian sistem keuangan daerah dengan *cash management system* Bank serta memperluas kanal pembayaran pajak & retribusi daerah.



Gambar 3. Perkembangan APBD Provinsi Lampung

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, 2022

Komite Teknologi Keuangan Daerah (KT-KD) yang bertugas mengawasi dan melaksanakan strategi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Langkah ini diambil sebagai upaya Pemerintah untuk mencapai target inklusi keuangan pada tahun 2024 sebesar 90% dan mewujudkan visi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dalam kebijakan ini, Menteri Perekonomian ditunjuk sebagai Ketua Satgas yang terdiri dari enam perwakilan menteri lainnya serta Gubernur Bank Indonesia. Langkah selanjutnya, Pemerintah pusat secara resmi mengamanatkan kepada Pemerintah daerah di bawahnya untuk segera membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Dampak penerapan kebijakan ETPD secara rata-rata dapat meningkatkan PAD sebesar 2,91% pada pemerintah daerah dengan nilai IP-TIK rendah dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan nilai IP-TIK sedang. Instruksi kepada daerah yang jelas tersebut menyatakan bahwa setelah keputusan presiden diterbitkan, Pemerintah daerah harus segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) di daerah masing-masing yang dipimpin oleh Kepala Daerah. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan upaya untuk mengubah metode transaksi pendapatan dan belanja daerah dari penggunaan uang tunai menjadi transaksi non tunai melalui berbagai instrumen digital.

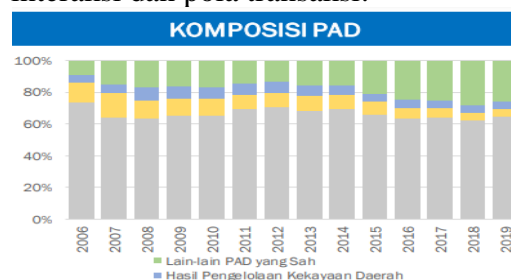
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal.

Salah satu peran dari Bank Indonesia adalah dengan Untuk mendukung digitalisasi di daerah, Pemerintah membentuk Satgas P2DD dan TP2DD untuk koordinasi dan pelaksanaan program. Program *championship* digunakan untuk meningkatkan motivasi pemerintah daerah dalam digitalisasi. Tantangan termasuk tingginya preferensi uang tunai, infrastruktur terbatas di daerah terpencil, dan ketimpangan SDM pemerintah daerah. Solusinya termasuk pembinaan kesadaran masyarakat, peningkatan infrastruktur digital, serta pelatihan SDM.

Pengalaman dalam penyaluran bantuan melalui mekanisme non tunai telah meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat prasejahtera yang sebelumnya kurang terjangkau oleh layanan perbankan. Kebijakan bank sentral dalam mengatur pembayaran non tunai telah terbukti efektif dalam mempercepat sistem pembayaran nasional. Sebagai satu-satunya otoritas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mendorong implementasi elektronifikasi transaksi keuangan di daerah.

Salah satu upaya perluasan yang dilakukan adalah rencana sentralisasi aktivitas transaksi pembayaran retribusi dan pajak melalui koordinasi e-commerce. Inisiatif ini didukung oleh tingginya minat masyarakat dalam menggunakan aplikasi e-commerce untuk aktivitas pembayaran ritel, yang menciptakan konsep *one-stop shopping* dalam transaksi keuangan. Selain

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang di masa pandemi Covid-19 cenderung mengalami perubahan dalam pola interaksi dan pola transaksi.



Gambar 4. Komposisi Pendapatan Asli Daerah

Sumber: DJPK-Kemenkeu, EY, KPK, *The Conversation (Seluruh satuan dalam Juta), 2019*

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah ini secara umum telah mengaktifkan fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban secara vertikal. Pengendalian terhadap kinerja penarikan pajak melalui Samsat lebih efektif karena dapat dilakukan secara *real time*. Namun, dari indikator capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah ternyata belum optimal. Bahkan rasio realisasi PAD terhadap APBD cenderung stagnan, bahkan menurun pada 2014-2017.

Dalam 13 tahun terakhir, APBD di Sumatera cenderung defisit dimana pendapatan masih bergantung pada dana transfer pusat. Kontribusi PAD masih kecil walaupun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, anggaran belanja daerah yang semakin meningkat dapat meningkatkan risiko kebocoran anggaran apabila *governance* pengelolaan kas daerah

tidak dijaga dengan menerapkan pembayaran non tunai dan kontrol internal yang baik.

Namun, dalam penyelarasan akselerasi diterapkannya literasi keuangan, masih terdapat inefisiensi dan kurangnya optimalisasi yang ada dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun oleh Provinsi Lampung. Sistem pembiayaan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dan terdistribusi dengan baik untuk hal-hal yang esensial. Begitu pula dengan IETPD, masih banyak Kabupaten/Kota yang belum transparansi dengan adanya pendapatan-pendapatan yang diterima, baik dari sektor pajak maupun retribusi untuk distribusi penggunaannya. Selain itu, beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya minat masyarakat dalam bertransaksi non tunai, kurangnya kompetensi sumber daya manusia dari pemerintah daerah, infrastruktur atau layanan sistem perbankan yang kurang memadai, infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang tidak stabil, dan yang paling krusial adalah komitmen dari pemerintah daerah sendiri yang kurang optimal dan tanggap dalam perluasan transaksi yang berbasis elektronifikasi. Salah satu komitmen yang perlu diterapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung adalah dengan mendorong berlanjutnya peningkatan konsumsi rumah tangga dengan menjaga pemulihan daya beli masyarakat yang dapat dilakukan dengan optimalisasi peran TPID dalam rangka pengendalian inflasi, percepatan pemanfaatan dana desa, realisasi bantuan sosial/subsidi dan program perbaikan kesejahteraan terutama yang menysasar pada UMKM dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan

Rendah), termasuk akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien melalui perluasan penggunaan QRIS dan intensifikasi program elektronifikasi.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, belum optimalnya peningkatan realisasi PAD, pasca pemanfaatan sistem elektronik berbasis web dalam pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Lampung membuat peneliti tertarik untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat literasi keuangan dan inefisiensi realisasi pendapatan asli daerah yang ditindaklanjuti melalui gagasan implementasi program elektronifikasi transaksi untuk mencapai era ekonomi digital Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian ETPD

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah langkah untuk mengubah metode transaksi pendapatan dan belanja daerah dari uang tunai menjadi transaksi non tunai menggunakan instrumen berbasis digital. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal. Pemerintah telah menerapkan ini secara luas, terutama dengan memperkenalkan penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui mekanisme non tunai.

Pengalaman dalam penyaluran program bantuan melalui mekanisme non tunai telah membantu meningkatkan inklusi

keuangan di kalangan masyarakat prasejahtera yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan. Digitalisasi bukan merupakan pekerjaan hanya melibatkan pihak tertentu, akan tetapi inovasi ini dilakukan secara tersistem, yang melibatkan banyak pihak.

Proses inovasi ini terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, sistem *up to down*, dan yang kedua, pola *bottom to up*. Pola *bottom to up*, yaitu gagasan dimulai dari level yang rendah kemudian diusulkan dan dilaksanakan ke level yang lebih tinggi. diawali dari gagasan masyarakat hingga terbit regulasi dan terlaksana oleh pemerintah. Pola ini merupakan, pola *bottom to up*, dimana masyarakat berada pada tataran level dasar hingga diakomodir oleh level yang tinggi dalam hal ini adalah pemerintah. Adapun pola *up to down* merupakan kebalikan dari pola *bottom to up*, dimana gagasan maupun ide diawali dari level yang lebih tinggi kemudian diimplementasikan pada level yang paling bawah. Kedua pola ini sama-sama tersistem dan melibatkan banyak pihak, bukan merupakan pekerjaan individual secara sendiri-sendiri.

Kegiatan Elektronifikasi ini dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014 melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar. Selain itu, Gerakan Nasional non Tunai juga dapat mengurangi kendala transaksi tunai seperti uang rusuh, dan kendala membawa uang dalam jumlah besar saat transaksi yang outputnya ditargetkan dapat menciptakan *cashless society*. Kegiatan ini merupakan bentuk akomodir dengan hadirnya teknologi

digital terutama teknologi finansial dimana fase saat ini merupakan fase revolusi industry 4.0. Program elektronifikasi yang dijalankan oleh Bank Indonesia meliputi 3 (tiga) bagian, yaitu Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Bantuan Sosial, dan upaya meningkatkan elektronifikasi, Bank Indonesia telah mengeluarkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025.

Beberapa indikator atau aspek dari ETPD adalah aspek implementasi yaitu pajak, retribusi, belanja daerah dan kanal pembayaran non tunai. Kedua, aspek realisasi yaitu realisasi QRIS dan teller. Ketiga, aspek lingkungan strategis yaitu SP2D online, CMS, integrasi CMS dengan sistem keuangan, sosialisasi, jaringan 2G, jaringan 3G dan jaringan 4G. Indikator-indikator tersebut mempunyai proporsi *score*, tahap dan jumlah kanalnya masing-masing, sesuai dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, termasuk pajak dan retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Definisi ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengumpulan dan pengelolaan pendapatan oleh pemerintah daerah. Tujuan utama dari pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menghasilkan dana sendiri dalam rangka melaksanakan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.

Menurut Warsito (2001). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah, serta pendapatan lainnya yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menyatakan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah, berasal dari pungutan-pungutan yang dilakukan pemerintah di daerah-daerah. Contoh: Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang telah di atur dalam peraturan daerah masing-masing serta hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Kesit Bambang, 2003). Pajak daerah dapat dijelaskan menurut wilayah kekuasaan bagi pihak pemungutnya. Berikut penjelasan mengenai wilayah pemungutan pajak daerah:
 - a. Pajak Provinsi. Jenis pajak provinsi, sebagai berikut:
 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 2. Biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Pajak Kabupaten atau Kota. Jenis pajak kabupaten, sebagai berikut:
 1. Pajak hotel
 2. Pajak restoran.
 3. Pajak hiburan.
 4. Pajak reklame.
 5. Pajak penerangan jalan.
 6. Pajak pengambilan bahan.
 7. Pajak parkir.
 8. Pajak air tanah.
 9. Pajak sarang burung wallet.
 10. Pajak bumi, pedesaan, dana perkotaan.
 11. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2. Retribusi daerah. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 1 mengatakan bahwa retribusi adalah pungutan pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang langsung dapat dirasakan langsung oleh pembayar retribusi. Berikut adalah penjelasan dari subjek retribusi daerah yang dikelompokkan:
 - a. Subjek retribusi jasa umum. Orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa umum.
 - b. Subjek retribusi jasa usaha. Orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa usaha.
 - c. Subjek retribusi perizinan tertentu. Orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini merupakan wajib retribusi perizinan tertentu. Berikut

adalah ciri pokok retribusi daerah, yaitu:

- a. Retribusi yang dipungut daerah.
 - b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan atau menikmati jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
 - c. Pungutan retribusi terdapat prestasi daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. Menurut pasal 6 UU no 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. Jasa giro.
 - c. Pendapatan bunga.
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - e. Komisi, potongan, atau apapun bentuk lain, sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah

Pengertian Literasi Keuangan

Terdapat dinamika mengenai konsep literasi keuangan di berbagai negara sehingga pengertian literasi keuangan di dalam SNLKI (2013) perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan oleh OJK baik dalam (Revisit 2017) maupun regulasi yang mengatur mengenai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Penyempurnaan pengertian literasi keuangan dilakukan dengan menambahkan aspek sikap dan perilaku keuangan di samping pengetahuan, keterampilan dan keyakinan terhadap lembaga, produk dan layanan jasa

keuangan. Secara lengkap pengertian literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Literasi keuangan (*Financial Literacy*) berkaitan dengan kompetensi seseorang untuk mengelola keuangan. Huston (2010) menyatakan bahwa pengetahuan finansial merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi finansial, namun belum. Menurut Sabri (2011) mendefinisikan melek finansial dengan tindakan mengetahui fakta-fakta dan pengertian yang diperlukan untuk mengelola keuangan pribadi sehingga berhasil mengelola keuangan dengan baik. Sementara, menurut Kim (2001) dalam Sabri (2011) literasi keuangan adalah pengetahuan dasar bahwa orang perlu untuk bertahan hidup dalam masyarakat modern.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui keuangan secara umum, dimana pengetahuan tersebut mencakup tabungan, investasi, hutang, asuransi serta perangkat keuangan lainnya. Adanya pengetahuan keuangan dan literasi keuangan akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi, sehingga individu tersebut bisa memaksimalkan nilai waktu uang dan keuntungan yang diperoleh oleh individu akan semakin besar dan akan meningkatkan taraf kehidupannya. Literasi keuangan juga secara langsung berkorelasi dengan perilaku keuangan yang positif seperti pembayaran tagihan tepat waktu,

angsuran pinjaman, tabungan sebelum habis dan menggunakan kartu kredit secara bijaksana. Literasi keuangan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, kebutuhan individu dan produk keuangan, individu harus memiliki literasi keuangan untuk mengatur keuangan pribadinya.

Aspek Literasi Keuangan

Literasi keuangan mencakup banyak aspek yang perlu diukur. Literasi keuangan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan mendapatkan perhatian yang lebih, khususnya pada negara-negara maju. Istilah literasi keuangan adalah kemampuan seorang individu untuk mengambil keputusan dalam hal pengaturan keuangan pribadinya. Chen & Volpe (1998) dalam Margaretha (2015) membagi literasi keuangan menjadi empat aspek, yaitu:

- a. Pengetahuan keuangan dasar (*basic financial knowledge*) yang mencakup pengeluaran, pendapatan, aset, hutang, ekuitas, dan risiko. Pengetahuan dasar ini biasanya berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam melakukan investasi atau pembiayaan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola uang yang dimiliki.
- b. Simpanan dan pinjaman (*saving and borrowing*), merupakan produk perbankan yang lebih dikenal sebagai tabungan dan kredit. Tabungan merupakan sejumlah uang yang disimpan untuk kebutuhan di masa depan.

- c. Proteksi atau asuransi (*insurance*) merupakan suatu bentuk perlindungan secara finansial yang bisa dilakukan dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi pendidikan, dan asuransi kesehatan. Tujuan dari proteksi adalah untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi hal yang tidak terduga seperti kematian, kehilangan, kecelakaan, atau kerusakan.
- d. Investasi merupakan suatu bentuk kegiatan penanaman dana atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang. Bentuk investasi bisa berupa aset riil (properti atau emas), aset keuangan (saham, deposito, obligasi, dan aset keuangan lainnya) dan lain-lain.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah *mixed methods* dengan desain *Sequintal Explanatory* yang pendekatannya deskriptif. Metode campuran (*mixed methods*) merupakan penelitian dengan mengkombinasikan dua bentuk penelitian antara kuantitatif dengan kualitatif sehingga dapat di peroleh data yang lebih komperhensif, valid, dan reliable. Pendekatan kuantitatif penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui BPS, Bapenda, Bappeda, BPKAD, TP2DD/SIP2DD dan DJPK Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Analisis penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Provinsi Lampung dan DJPK Kemenkeu dengan rentang waktu 2021-2022. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan ETPD dan pendapatan asli daerah sebagai variabel moderasi serta variabel dependen literasi keuangan. Adapun daftar daerah provinsi Lampung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Daerah

No	Nama Daerah
1	Kabupaten Tanggamus
2	Kabupaten Tulang Bawang
3	Kabupaten Lampung Barat
4	Kabupaten Lampung Tengah
5	Kabupaten Lampung Utara
6	Kota Bandar Lampung
7	Kabupaten Pringsewu
8	Kabupaten Way Kanan
9	Kabupaten Lampung Selatan
10	Kota Metro
11	Kabupaten Lampung Timur
12	Kabupaten Mesuji
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat
14	Kabupaten Pesawaran
15	Kabupaten Pesisir Barat

Sumber: BPS Lampung, data diolah 2023

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum dari data yang digunakan. Tabel 5 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian berupa variabel independen yaitu implementasi kebijakan ETPD (X) dan variabel moderasi pendapatan asli daerah (Z) serta variabel dependen yaitu literasi keuangan (Y). Variabel-variabel penelitian tersebut diinterpretasikan

dalam nilai mean, median, maximum, minimum. Jumlah pengamatan pada penelitian yaitu 30 data dan merupakan gabungan dari 15 daerah di provinsi Lampung selama tahun 2021-2022. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Y	X	Z
Mean	56.42000	80.26600	218.8850
Median	56.42000	84.82500	144.0800
Maximum	74.81000	96.50000	991.5800
Minimum	38.03000	26.28000	28.36000
Std. Dev.	18.70438	15.80485	206.7340
Observations	30	30	30

Notes: Y = Literasi keuangan; X = Implementasi Kebijakan ETPD; Z = Pendapatan asli daerah

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan tabel tersebut, yaitu:

- Literasi keuangan (Y) tertinggi sebesar 74.81 dan terendah sebesar 38.03. Nilai mean dan median pada variabel literasi keuangan masing-masing sebesar 56.42. Adapun standar deviasi literasi keuangan sebesar 18.70.
- Implementasi Kebijakan ETPD (X) tertinggi sebesar 96.50 dan terendah sebesar 26.28. Nilai mean dan median indeks ETPD sebesar 80.27 dan 84.83. Adapun standar deviasi pada variabel implementasi kebijakan ETPD sebesar 15.81.
- Pendapatan asli daerah (Z) tertinggi sebesar 991.58 dan terendah sebesar 28.36. Nilai mean dan median pendapatan asli daerah sebesar 218.89 dan 144.08. Adapun standar deviasi pada pendapatan asli daerah sebesar 206.73.

Estimasi Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel, hal ini dikarenakan data yang digunakan merupakan data

panel. Data panel yaitu gabungan dari data *time series* (runtun waktu tahun 2021-2022) dan data *cross section* (15 daerah). Widarjono (2013:355-361) menjelaskan bahwa secara umum, apabila menggunakan data panel akan menghasilkan *intercept* dan slope koefisien yang berbeda pada setiap daerah dan setiap periode waktu dan dalam mengestimasi regresi data panel terdapat tiga model, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

Model Common effect

Model *common effect* merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Hasil estimasi model *common effect* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Model Common effect

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2021 2022				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 15				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.72059	32.29961	-0.331911	0.7426
X	0.860690	0.393725	2.186016	0.0380
Z	0.076158	0.113660	0.670048	0.5087
X*Z	-0.001109	0.001471	-0.753935	0.4577
Root MSE	15.27718	R-squared		0.309882
Mean dependent var	56.42000	Adjusted R-squared		0.230253
S.D. dependent var	18.70438	S.E. of regression		16.41033
Akaike info criterion	8.557265	Sum squared resid		7001.770
Schwarz criterion	8.744091	Log likelihood		-124.3590
Hannan-Quinn criter.	8.617032	F-statistic		3.891578
Durbin-Watson stat	2.670714	Prob(F-statistic)		0.020159

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil regresi diatas, model persamaan untuk persamaan dengan menggunakan metode *common*

effect dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = -10.7206 + 0.8607 X + 0.0762 Z - 0.0011 X*Z$$

R Square = 30.99 %
 Adjusted R-Squared = 23.03%

Model Fixed Effect

Model *Fixed effects* merupakan model pendekatan data panel yang mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan *intercept*-nya. Hasil estimasi model *fixed effect* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Model Fixed Effect

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2021 2022				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 15				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic Prob.	
C	-104.9831	24.19391	-4.339235	0.0000
X	2.201799	0.290797	7.571593	0.0047
Z	0.158063	0.071430	2.212832	0.0312
X*Z	-0.002974	0.001010	-2.944034	0.0033
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	5.905011	R-squared	0.896895	
Mean dependent var	56.42000	Adjusted R-squared	0.750831	
S.D. dependent var	18.70438	S.E. of regression	6.433643	
Akaike info criterion	7.589480	Sum squared resid	643.1046	
Schwarz criterion	8.430198	Log likelihood	95.84220	
Hannan-Quinn criter.	7.858433	F-statistic	6.140392	
Durbin-Watson stat	3.750000	Prob(F-statistic)	0.001378	

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil regresi diatas, model persamaan untuk persamaan dengan menggunakan metode *fixed effect* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = -104.9831 + 2.2018 X + 0.1581 Z - 0.0029 X*Z$$

R Square = 89.69 %
 Adjusted R-Squared = 75.08%

Model Random Effect

Pendekatan model *random effect* merupakan model pendekatan dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Hasil estimasi model *random effect* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Model Random Effect

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Sample: 2021 2022				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 15				
Total panel (balanced) observations: 30				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.72059	18.37684	-0.583375	0.5647
X	0.860690	0.224010	3.842199	0.0007
Z	0.076158	0.064667	1.177693	0.2496
X*Z	-0.001109	0.000837	-1.325136	0.1967
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			9.336643	1.0000
Weighted Statistics				
Root MSE	15.27718	R-squared	0.309882	
Mean dependent var	56.42000	Adjusted R-squared	0.230253	
S.D. dependent var	18.70438	S.E. of regression	16.41033	
Sum squared resid	7001.770	F-statistic	3.891578	
Durbin-Watson stat	2.670714	Prob(F-statistic)	0.020159	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.309882	Mean dependent var	56.42000	
Sum squared resid	7001.770	Durbin-Watson stat	2.670714	

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil regresi diatas, model persamaan untuk persamaan dengan menggunakan metode *random effect* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = -10.7206 + 0.8607 X + 0.0762 Z - 0.0011 X*Z$$

R Square = 30.99 %
 Adjusted R-Squared = 23.03%

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2013: 362), pemilihan model terbaik dapat ditentukan dengan melakukan uji statistik F atau Uji Chow, dan Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier.

1. Uji Chow Model Fixed Effect

Widarjono (2013: 362) menyatakan bahwa uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* lebih baik daripada pendekatan *common effect* dengan cara melihat *sum of squared residuals* (RSS). Hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_a = \text{Fixed Effect Model}$$

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

H_0 diterima bila nilai Prob. *cross section chi square* > 0.05 atau

H_a diterima bila nilai Prob. *cross section chi square* < 0.05

Hasil pengujian model *fixed effect* menggunakan ujichow dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.880035	(14,12)	0.0045
Cross-section Chi-square	57.033546	14	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Hasil pengujian uji chow, menunjukkan bahwa probabilitas *cross*

section chi square sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha (0.05) sehingga H_0 diterima. Maka metode yang sesuai dalam penelitian dan teknik terbaik untuk melakukan uji regresi adalah model *fixed effect*.

2. Uji Hausman Model *Random Effect*

Widarjono (2013: 64) menjelaskan bahwa uji *Hausman* digunakan untuk memilih model pendekatan mana yang lebih tepat antara *fixed effect* dengan pendekatan *random effect* dalam regresi data panel, dengan hipotesis:

$H_0 = \text{Random effect model}$

$H_a = \text{Fixed effect model}$

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

H_0 diterima bila nilai Prob. *Cross section random* > 0.05 atau

H_a diterima bila nilai Prob. *Cross section random* < 0.05

Adapun hasil pengujian model *random effect* menggunakan uji hausman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	68.320496	3	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Hasil uji Hausman diatas menunjukkan bahwa probabilitas *cross section random* sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha (0.05) sehingga H_0 diterima, maka artinya model yang tepat untuk

regresi data panel adalah model *fixed effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier Model *Common Effect*

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah pendekatan *random effect* lebih baik daripada pendekatan *common effect* (Widarjono, 2013). Uji Chow dan uji Hausman dalam penelitian ini telah menunjukkan jika model yang terbaik yaitu model *fixed effect*, oleh karena itu pada penelitian ini tidak diperlukan pengujian *Lagrange Multiplier*.

Uji Asumsi Klasik

Dalam regresi data panel dengan pendekatan OLS, uji asumsi klasik utama adalah heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Heteroskedastisitas diperlukan karena data panel dapat memiliki variasi varian yang tidak konstan, sementara multikolinearitas perlu dipertimbangkan karena terdapat lebih dari satu variabel independen yang saling terkait kuat. Uji asumsi klasik lainnya seperti normalitas, autokorelasi, dan linearitas tidak perlu diperhitungkan secara khusus dalam konteks regresi data panel karena tidak relevan atau sudah diasumsikan terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013: 139) menjelaskan bahwa heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan dalam varian residual antara pengamatan yang satu dengan yang lain dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode statistik Glejser dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi dari variabel independen di atas tingkat kepercayaan 5%, menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi dari variabel independen di bawah tingkat kepercayaan 5%, maka menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

Dengan demikian, hasil uji Glejser ini memberikan indikasi apakah terdapat ketidaksamaan dalam varian residual antara observasi-observasi dalam model regresi.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2021 2022				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 15				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.559105	3.08E-14	1.48E+14	0.0000
X	-3.73E-16	3.70E-16	-1.008620	0.3331
Z	-9.19E-17	9.08E-17	-1.012026	0.3315
X*Z	0.000000	1.28E-18	0.000000	1.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	7.51E-15	R-squared	1.000000	
Mean dependent var	4.559105	Adjusted R-squared	1.000000	
S.D. dependent var	3.816984	S.E. of regression	1.19E-14	
Akaike info criterion	-61.00784	Sum squared resid	1.69E-27	
Schwarz criterion	-60.16712	Log likelihood	933.1176	
Hannan-Quinn criter.	-60.73889	F-statistic	1.76E+29	
Durbin-Watson stat	3.749125	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai probability uji Glejser pada variabel independen implementasi kebijakan ETPD dan variabel moderasi pendapatan asli

daerah nilai $> 0,05$ (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali dan Ratmono (2013:77), uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Ghozali dan Ratmono (2013:79) selanjutnya berpendapat bahwa korelasi antara dua variabel independen yang melebihi 0.80 menjadi pertanda bahwa multikolinieritas merupakan masalah serius. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- a. Data tidak terjadi multikolinieritas, apabila nilai koefisien < 0.80 , atau
- b. Data mengalami multikolinieritas, apabila nilai koefisien > 0.80

Koefisien korelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 9. Uji Multikolinieritas

	X	Z
X	1	-0.24722
Z	-0.24722	1

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Hasil pengujian yang dilakukan terlihat bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel independen implementasi kebijakan ETPD dan pendapatan asli daerah memiliki nilai < 0.80 yaitu sebesar 0.24722, sehingga model regresi yang digunakan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Analisis Regresi Berganda Moderasi Data Panel

Hubungan variabel independen implementasi kebijakan ETPD terhadap variabel dependen literasi keuangan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Adapun hasil estimasi persamaan yang telah dilakukan setelah melalui uji chow dan uji hausman, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect* dengan hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 10. Model Fixed Effect

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2021 2022				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 15				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-104.9831	24.19391	-4.339235	0.0010
X	2.201799	0.290797	7.571593	0.0000
Z	0.158063	0.071430	2.212832	0.0470
X*Z	-0.002974	0.001010	-2.944034	0.0123

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil regresi diatas, model persamaan untuk persamaan dengan menggunakan metode *fixed effect* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = -104.9831 + 2.2018 X + 0.1581 Z - 0.0029 X*Z$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Konstanta c sebesar -104.9831, artinya apabila variabel independen implementasi kebijakan ETPD dan variabel moderasi pendapatan asli daerah sebesar 0, maka literasi keuangan sebesar -104.9831.
- Nilai koefisien variabel independen implementasi kebijakan ETPD (X) sebesar 2.2018 yang menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan ETPD memiliki hubungan positif terhadap

variabel literasi keuangan. Artinya apabila variabel independen implementasi kebijakan ETPD mengalami kenaikan sebesar 1% sementara variabel moderasi pendapatan asli daerah bersifat tetap maka variabel literasi keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 220.18%.

- Nilai koefisien variabel moderasi pendapatan asli daerah (Z) sebesar 0.1581 dan menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki hubungan positif terhadap variabel literasi keuangan. Artinya apabila variabel moderasi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 1 sementara variabel independen indeks ETPD bersifat tetap maka variabel literasi keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 15.81%.
- Variabel X*Z merupakan perkalian antara variabel independen indeks ETPD dengan variabel moderasi pendapatan asli daerah. Adapun koefisien regresi yang diperoleh sebesar -0.0029 dengan arah negatif, hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memperlemah hubungan antara indeks ETPD terhadap literasi keuangan sebesar 0.0029.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan uji f untuk mengetahui model yang diestimasi sudah layak untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F Statistik

Menurut Ghosalidan Ratmono (2013: 59), uji kelayakan model digunakan untuk menguji ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual yang dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Penelitian ini menggunakan nilai statistik F untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $Prob. \leq \alpha (0.05)$, maka H_a diterima yaitu implementasi kebijakan ETPD dan variabel moderasi pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan.
- b. Jika nilai $Prob \geq \alpha (0.05)$, maka H_0 diterima yaitu implementasi kebijakan ETPD dan variabel moderasi pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan.

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Statistik F

Root MSE	5.905011	R-squared	0.896895
Mean dependent var	56.42000	Adjusted R-squared	0.750831
S.D. dependent var	18.70438	S.E. of regression	9.336643
Akaike info criterion	7.589480	Sum squared resid	1046.075
Schwarz criterion	8.430198	Log likelihood	-95.84220
Hannan-Quinn criter.	7.858433	F-statistic	6.140392
Durbin-Watson stat	3.750000	Prob(F-statistic)	0.001378

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas f-statistic lebih kecil dari alpha (0.05) yaitu sebesar $0.001378 < 0.05$ yang artinya implementasi kebijakan ETPD dan

variabel moderasi pendapatan asli daerah secara simultan/bersamaan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu menerima H_a .

Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali dan Ratmono (2013: 62), uji t pada dasarnya memiliki tujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $prob. \leq \alpha (0.05)$ maka H_a diterima
Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $prob \geq \alpha (0.05)$ maka H_0 diterima
Hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Uji Statistik t

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2021 2022				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 15				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-104.9831	24.19391	-4.339235	0.0010
X	2.201799	0.290797	7.571593	0.0000
Z	0.158063	0.071430	2.212832	0.0470
X*Z	-0.002974	0.001010	-2.944034	0.0123

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka:

- a. Hipotesis 1 = (Implementasi Kebijakan ETPD berpengaruh signifikan terhadap Literasi keuangan)

Nilai prob. variabel implementasi kebijakan ETPD < nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.0000 < 0,05$, sehingga variable kebijakan ETPD berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan di Provinsi Lampung tahun 2021-2022. Kesimpulan pada penelitian menerima H1 artinya Implementasi Kebijakan ETPD berpengaruh signifikan terhadap Literasi keuangan.

- b. Hipotesis 2 = (Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Literasi keuangan)

Nilai prob. variabel pendapatan asli daerah < nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.0470 < 0.05$, sehingga variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan di Provinsi Lampung tahun 2021-2022. Kesimpulan pada penelitian menerima Ha.

- c. Hipotesis 3 = (Pendapatan asli daerah dapat memoderasi pengaruh Implementasi Kebijakan ETPD terhadap Literasi keuangan)

Nilai probabilitas perkalian antara Indeks ETPD dan Pendapatan asli daerah ($X*Y$) < alpha 0.05 sebesar $0.0123 < 0,05$, artinya pendapatan asli daerah dapat memoderasi pengaruh Implementasi Kebijakan ETPD terhadap Literasi keuangan di Provinsi Lampung tahun 2021-2022. Kesimpulan pada penelitian menerima H3.

Koefisien Determinasi (R²)

Ghozali dan Ratmono (2013: 59) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R-squared) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar nol sampai satu. Nilai R-squared yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Koefisien Determinasi (R²)

Root MSE	5.905011	R-squared	0.896895
Mean dependent var	56.42000	Adjusted R-squared	0.750831
S.D. dependent var	18.70438	S.E. of regression	9.336643
Akaike info criterion	7.589480	Sum squared resid	1046.075
Schwarz criterion	8.430198	Log likelihood	-95.84220
Hannan-Quinn criter.	7.858433	F-statistic	6.140392
Durbin-Watson stat	3.750000	Prob (F-statistic)	0.001378

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil pengujian, tabel diatas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien determinasi adjusted r square sebesar 0.7508. Nilai adjusted r square sebesar 0.7508, hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel bebas implementasi kebijakan ETPD (X) dan variabel moderasi pendapatan asli daerah (Z) terhadap variabel dependen literasi keuangan (Y) di Provinsi Lampung tahun 2021-2022 sebesar 75.08% sedangkan sisanya 24.92% ($100\% - 75.08\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi.

Tindak Lanjut Terhadap Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Berdasarkan identifikasi awal, terdapat empat area yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam percepatan dan perluasan transformasi elektronifikasi transaksi di Pemda. Pertama area penguatan kebijakan, kedua penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung, ketiga peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan literasi dan edukasi, dan terakhir adalah penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga dan institusi. Keempat area penguatan

tersebut menjadi fokus pemetaan dan identifikasi pada proses digitalisasi dalam kegiatan transaksi keuangan di Pemda, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: Ilustrasi Penulis, 2023

Penguatan Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan good governance di lingkungan birokrasi, berbagai aturan dan kebijakan telah diterbitkan, salah satunya adalah Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk membuka peluang bagi Pemerintah daerah dalam mengadopsi transaksi digital di birokrasi mereka.

Namun, meskipun kebijakan ini telah ada, data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dari total 467 Pemda di seluruh Indonesia, hanya 210 Pemda (sekitar 45%) yang telah mengeluarkan peraturan turunan terkait elektronifikasi transaksi belanja dan pendapatan Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mengadopsi secara konsisten dan menyeluruh kebijakan tersebut di seluruh daerah.

Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang teknologi informasi dan mempercepat implementasi digitalisasi di sektor publik, diperlukan penguatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas tenaga kerja yang terampil. Salah satu langkah percepatan yang dapat dilakukan adalah dengan merekrut tenaga kerja profesional yang

memiliki keahlian khusus dalam teknologi informasi.

Selain itu, jika memungkinkan, proses pengembangan awal dalam implementasi digitalisasi dapat dialihdayakan (outsourcing) kepada pihak lain yang memiliki kompetensi spesifik sesuai dengan kebutuhan daerah. Meskipun demikian, Pemerintah daerah tetap berperan sebagai pemegang kendali utama dalam proses ini, memastikan bahwa kebijakan dan implementasi berjalan sesuai dengan visi dan kebutuhan lokal.

Dengan pendekatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi di sektor publik dapat berjalan lebih efisien dan efektif, mendukung perbaikan layanan publik dan penguatan good governance secara menyeluruh.

Penguatan Infrastruktur

Peningkatan efektivitas di internal organisasi Pemda melalui media digital, dapat memberikan peningkatan akses bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan Pemda setempat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2018), proses pengembangan digitalisasi ini dilakukan di setiap interaksi baik antara Pemda dengan Pemda (*Governance to Governance/G2G*), Pemerintah daerah dengan Pihak Ketiga (*Governance to Bussines/G2B*) atau Pemerintah daerah dengan masyarakat (*Governance to Citizen/G2C*). Penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan public perlu diaplikasikan secara tepat, terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan sarana informasi.

Koordinasi dan Sinergi

Implementasi program ETP (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah) merupakan langkah krusial untuk

meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta untuk memperkuat pengelolaan dana Pemda dengan menjunjung transparansi dan good governance. Dukungan yang terus diberikan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia terhadap program ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan akses keuangan, tetapi juga untuk mempercepat dan mempermudah proses pembayaran bagi masyarakat. Meskipun digitalisasi telah diterapkan oleh Pemerintah Pusat di setiap daerah, namun tingkat adopsi elektronifikasi masih bervariasi dipengaruhi oleh kondisi dan kesiapan masing-masing Pemda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal yang telah disampaikan dan dilakukan oleh penulis selama melaksanakan program magang di Kampus Merdeka Bank Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis memperoleh ilmu dan pengalaman kerja dalam bidang kebanksentralan dan sistem pembayaran di Bank Indonesia baik melalui kegiatan *learning* yang telah difasilitasi oleh Bank Indonesia Institute maupun kegiatan *working experience* di satker penempatan
2. Penulis belajar untuk beradaptasi, bekerjasama, berkomunikasi dengan tim untuk menyelesaikan tugas yang ada.
3. Berdasarkan hasil riset dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan ETPD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Literasi Keuangan. Selain itu, variabel moderasi Pendapatan Asli Daerah

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Literasi Keuangan, dan terakhir adalah variabel moderasi Pendapatan Asli Daerah dapat memperlemah hubungan antara Implementasi Kebijakan ETPD terhadap Literasi Keuangan di Provinsi Lampung.

Pelaksanaan program magang Kampus Merdeka Bank Indonesia sudah sangat baik dan memberikan pengalaman serta ilmu baru bagi penulis. Terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan untuk menjadikan program magang Kampus Merdeka Bank Indonesia lebih baik lagi untuk di masa mendatang. Berikut beberapa saran untuk program ini:

1. Materi yang disediakan di LMS Matrix mungkin dapat diperbolehkan untuk diunduh oleh peserta, supaya peserta dapat mempelajari materi tersebut kapan saja meskipun sudah tidak menjadi peserta magang Kampus Merdeka Bank Indonesia.
2. Perolehan PAD di Provinsi Lampung perlu di optimalisasi peningkatan sehingga diperlukan strategi pembaharuan PAD untuk meningkatkan ketahanannya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan daerah di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung harus lebih terarah, utamanya dalam peningkatan digitalisasi daerah. Mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan fungsi ekonomi, pelayanan publik, serta transparansi keuangan Pemerintah Daerah dan output akhirnya akan memengaruhi peningkatan PAD.

3. Untuk Bank Indonesia agar selalu meningkatkan perkembangan sistem elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dengan berbagai aplikasi agar kedepannya Pemerintah Daerah dapat lebih berkembang dan efektif dalam pelaksanaan transaksi daerah, serta dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah dan Pengeluaran Dana Daerah di setiap Provinsi.
4. Untuk Provinsi Lampung, disarankan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah, mengefektifkan pengeluaran daerah, mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui integrasi kebijakan elektronifikasi transaksi, serta membuat regulasi daerah yang dapat mempertegas penerimaan daerah.
5. Untuk sistem elektronifikasi transaksi di setiap pemerintah daerah, disarankan untuk mengefisiensikan *Costumer Presented Mode* (CPM), dengan

cara QR code ditunjukkan oleh konsumen sedangkan merchant akan melakukan scan QR. Model CPM, QR code hanya berbentuk dinamis disebabkan QR code ini di *generate* oleh *user* setiap melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barinova, V. A., & Zemtsov, S. P. (2020). Inclusive growth and regional sustainability of Russia. *Regional research of Russia, 10*, 10-19.
- Kementrian Keuangan. (2022). <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. (Diakses pada 10 Juni 2023).
- Nukpezah, J., Abutabenjeh, S., & Azhar, A. (2022). Do smart cities technologies contribute to revenue performance? Evidence from US local governments. *Public Performance & Management Review, 45*(5), 1155-1180.
- Saifuddin, R. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 8*(02), 183-183.